




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

5.3.4 SOP Pelayanan Konsultasi Hukum KUKM

 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Koperasi dan UKM Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	12 Desember 2019
	Tanggal Revisi	:	8 Februari 2023
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi dan UKM <u>Dr. Andromeda Qomariah, M.M.</u> NIP. 196801171994032003
	Nama SOP	:	Pelayanan Konsultasi Hukum KUKM

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 10. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mengetahui semua proses pelayanan secara umum 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	
15. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 Tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	
Keterikatan SOP	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Menyurat	2. Komputer/Smartphone 3. Internet 4. Alat Tulis Kantor 5. Printer 6. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka permasalahan yang ditangani dikhawatirkan tidak dapat terselesaikan.	1. Identitas Koperasi 2. Data pendukung Lain



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

SOP Pelayanan Konsultasi Hukum KUKM

No	Kegiatan	Pelaksana				Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid	Staf	Tenaga Ahli		Kelengkapan	Waktu	Output	
Melalui Surat Permohonan										
1.	Masyarakat anggota/calon anggota Koperasi, UMKM, dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah, Dinas Kabupaten/Kota atau yang mengajukan permohonan						Surat Permohonan	15 menit	Surat diterima dinas	
2.	Menerima berkas dari pemohon, secara langsung atau elektronik						Surat Permohonan	15 menit	Surat diterima dan diteruskan ke pimpinan	
3.	Menelaah surat masuk dan memberikan disposisi						Surat Permohonan	15 menit	Surat Permohonan diterima pimpinan	
4.	Menelaah disposisi dan menindaklanjuti disposisi kepada staf						Surat Permohonan	15 menit	Permasalahan selesai ditelaah dan ditindaklanjuti	
5.	Melakukan analisis dan tindak lanjut surat dari pemohon						Surat Permohonan	30 menit	Surat dianalisis secara aturan	
6.	Melaksanakan konsultasi hukum dengan pemohon						Surat Permohonan	360 menit	Hasil konsultasi permasalahan dengan tenaga ahli	
7.	Menyiapkan draft surat balasan konsultasi hukum sesuai dengan kebutuhan pemohon						Surat Permohonan, hasil konsultasi, komputer, printer, ATK	120 menit	Draft surat balasan	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan	Pelaksana				Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid	Staf	Tenaga Ahli		Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Draft surat balasan diparaf oleh kepala bidang						Draft surat balasan, ATK	1 hari	Draft surat telah diparaf kabid	
9.	Draft surat balasan ditandatangani kepala dinas						Draft surat balasan, ATK	1 hari	Surat telah ditandatangani kepala dinas	
10.	Kemudian surat balasan dikirim kepada pemohon						Surat balasan	1 hari	Surat balasan dikirim ke pemohon	
Secara Langsung/Tatap Muka										
1.	Masyarakat anggota/ calon anggota Koperasi, UMKM, dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah, Dinas Kabupaten/Kota atau datang langsung ke kantor Dinas Koperasi UKM atau klinik KUKM						-	15 menit	Pemohon datang untuk mendapat konsultasi hukum	
2.	Pemohon mengisi formulir Pelayanan Konsultasi Hukum						Formulir konsultasi hukum secara online	15 menit	Formulir terisi	
3.	Pemohon langsung melakukan konsultasi hukum dengan tim teknis (staf/tenaga ahli)						Formulir yang telah terisi, komputer, alat tulis kantor	360 menit	Hasil konsultasi permasalahan	
4.	Mengisi formulir evaluasi kepuasan pelayanan						Formulir evaluasi elektronik	10 menit	Formulir evaluasi terisi	
5.	Membuat laporan hasil pelaksanaan konsultasi hukum disertai dokumentasi						Formulir yang telah terisi, hasil konsultasi permasalahan, komputer, alat tulis kantor	60 menit	Laporan pelaksanaan	